



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNIRE YUNIRMAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 509442

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.346.400.000**

1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 125.300.000
3. Tanah Seluas 243 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 170.100.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2325 m2/400 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 697.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA LIMA PULUH KOTA, HASIL SENDIRI Rp. 283.500.000
8. Bangunan Seluas 9 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 199 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 828.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 463.500.000



2. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
3. LAINNYA, MITSUBISHI FUSO D16 Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
4. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	63.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	254.378.885
F. HARTA LAINNYA	Rp.	145.000.000
Sub Total	Rp.	4.637.278.885
III. HUTANG	Rp.	671.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.965.878.885

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.